

DAFTAR PUSTAKA

- Annual Report* Ombudsman Republik Indonesia Sumatera Barat, Tahun 2016.
- Annual Report* Ombudsman Republik Indonesia Sumatera Barat, Tahun 2017
- Amos, Abraham, H.F 2004. *Legal Opinion Aktualisasi* Teoretis dan Empirisme. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Arikunto, S. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Edisi Revisi 2010. Jakarta : Rineka Cipta.
- Azwar, A. 2010. *Pengantar Administrasi Kesehatan Edisi Ketiga*. Bina Rupa Aksara. Jakarta.
- Badan Pusat Statistik 2017. *Padang Dalam Angka 2016*.
- Bahriah., Sofyan, A. Faizal, A.H. Tanpa tahun. *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Pelayanan Kesehatan*. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar.
- Bethsyeb., Gabreilla. 2014. *Pelaksanaan Bantuan Hukum Cuma-Cuma Yang Diberikan Oleh Advokat Kepada Masyarakat Yang Kurang Mampu*.
- Bosarmen, S. J. 2013. *Analisis Putusan Sanksi Pidana Malpraktek Yang Dilakukan Oleh Bidan (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Tulung Agung)*. Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan, 2013.
- Creswell, J.W. (2014) *Research Design : Qualitative, quantitative and mixed method approaches*. Thousand Oaks, CA : Sage Publications.
- Dwi, A. E. 2015. *Perlindungan Hukum Bagi Pasien Pengguna JAMKESMAS Dalam Pelayanan Kesehatan di RSUD Dr. RM. Djoelham Binjai Terkait Berlakunya BPJS di Bidang Kesehatan*.
- Faddillah, Sean. 2010. *Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma Bagi Terdakwa Yang Tidak Mampu di Pengadilan Negeri Surakarta*.
- Forum Akses Keadilan untuk Semua (FOKUS), 2012. *Bantuan Hukum Untuk Semua*. Jakarta. *Open Society Justice Initiative*.
- Haritsa., Said, K., dan Syamsuddin, M, 2014. *Implementasi Bantuan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana di Kota Makasar*.
- Indar, 2013. *Fungsi Hukum Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan*.
- James, W. N., 1996. *Hak Asasi Manusia Refleksi Filosofis atas Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia*. Gramedia Pustaka Utama Jakarta, 1996.

Kusumah, Mulyana,W, 2011. Analisis Kritik RUU Bantuan Hukum, Jakarta : Pokja Paralegal, 2011.

Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (Kovenan Hak-Hak Sipil-*International Covenant on Civil and Political Right*).

Laporan Tahunan LBH Padang, 2014.

Laporan Tahunan LBH Padang, 2015.

Laporan Tahunan LBH Padang, 2016.

Laporan Tahunan Komisi Hak Asasi Manusia Sumatera Barat, Tahun 2015.

Lumintang, SH. Hukum Pidana Indonesia. Sinar Baru Bandung, Cetakan Ketiga. 1990.

Moehariono. 2014. Indikator Kinerja Utama. PT. Rajagrafindo Jakarta.

Mulyadi, Muhammad, 2011, Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif serta Pemikiran Dasar Penggabungannya. Jurnal Studi Komunikasi dan Media Vol. 15 No.1 (Januari-Juni 2011)

Mutholib, Ahmad,. Endah, Sri, W. (2017) Peranan Bantuan Hukum Dalam Proses Peradilan Pidana di Kabupaten Blora.

Notoatmodjo, S, Etika dan Hukum Kesehatan, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.

Nurwoko., Bagong, 2007. Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan.

Raista, Nur., Tazkiya, 2015. Perlindungan Hukum Yang Diberikan Oleh Lembaga Bantuan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Hubungan Berpacaran.

Paselle, Enos. 2013 Perencanaan Pembangunan Partisipatif Studi Tentang Efektivitas Musrenbang Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara.

PP Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan.

PP Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma.

PP Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Bantuan Hukum.

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Bantuan Hukum.

Pramita, S. D. 2011. Peran Lembaga Bantuan Hukum Semarang Dalam Perjuangan Penegakan Hukum Studi Kasus Atas Pencurian Kapuk Randu di Kabupaten Batang (Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. 95 hal.

Rahman, A. Arif. 2015. Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Terdakwa Yang Tidak Mampu Dalam Berpekara Pidana di Kota Bandar Lampung.

Rahmanto, T. Yuri. 2015. Bantuan Hukum “Pro Bono Publico” sebagai Alternatif Dalam Pemenuhan Hak Memperoleh Keadilan di Provinsi Jawa Timur.

Ramdani, Wahyu, S. 2013. Kedudukan Dan Peran Lembaga Bantuan Hukum Perguruan Tinggi.

Saefudin, Y. 2015. Implementasi Pemberian Bantuan Hukum Bagi Rakyat Miskin di Jawa Tengah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Sari. S. W (2016). Mediasi Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016.

Sama. J. Tanpa tahun. Tanggung Jawab Hukum dan Etika Kesehatan. Hal 84-96.

Dus, S, Sitorus. 2011. Laporan Akhir Penyusunan Kompedium Hukum Kesehatan, Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, 2011.

Sekjen MPR RI, 2009. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 amandemen ke empat.

Sugiyono, S. (2011). Metode penelitian kombinasi (*mixed methods*). Bandung: Alfabeta.

Suprayitno. B (208). Mediasi sebagai alternatif Penyelesaian Sengketa Antara Nasabah dan Bank serta Konsepsi ke depannya.

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) No. 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Umum.

Simanjuntak, E. 2012. Fungsi Pendampingan Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan Medan (LBH Apik Medan) Terhadap Ibu Rumah Tangga Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Siregar, E dan Budhiartie, A. Tanpa tahun. Perlindungan Hukum Hak-Hak Pasien Dalam Transaksi Terapeutik. Majalah Hukum Forum Akademika Hal : 172-194.

- Situmorang, Morgan, 2011. *Tanggung Jawab Negara dan Advokat dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat*. Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI.
- Sugiyono, 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)* Cetakan Ke-8. Alfabeta. Bandung.
- Sunggono, Bambang dan Aries Harianto, 2009. *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Bandung : Mandar Maju.
- Tantri, A.B 2010. *Upaya Bantuan Hukum Dokter Gigi Dalam Menghadapi Sengketa Medis*. Jurnal PDGI Vol.59 No. 1 Januari 2010 Hal 1-7.
- Tashakkori, A. (2007). *Handbook of mixed methods in social & behavioral research*. Thousand Oaks, Calif. CA : Sage Publications
- Triwibono, C, 2014. *Etika dan Hukum Kesehatan*, Nuha Medika, Yogyakarta.
- Thalal. M dan Hiswani. 2010. *Aspek Hukum Dalam Pelayanan Kesehatan*, Universitas Sumatera Utara Hal 72-75.
- Tri. B. 2013. *Sanksi Hukum Pidana Dalam Malpraktik Bagi Profesi Medis Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang*, 108 hal.
- Ubaidillah, K. 2016. *Analisis Perbandingan Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Kepada Orang Miskin Dalam Perkara Pidana di Propinsi Lampung* Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung. 112 hal.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1998 tentang Hak Asasi.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- Winarta, Frans Hendra, 2009. *Probono Publico ; Hak Konstitusional Fakir Miskin untuk Memperoleh Bantuan Hukum*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- YLBHI, 2013. *Bantuan Hukum Bukan Hak Yang Diberi*. Jakarta.

Yunus, N dan Lucyana D. 2008. Eksistensi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dalam Memberikan Layanan Hukum Kepada Masyarakat di Kabupaten Gorontalo. Vol 20; hal 411-588.

Yuri, Tony. R, 2015. Bantuan Hukum “Pro Bono Publico” Sebagai Alternatif Dalam Pemenuhan Hak Memperoleh Keadilan di Provinsi Jawa Timur.

<http://repository.UNAND.ac.id/Thesis.pdf> diakses pada tanggal 14 April 2018.

<http://www.pa-purworejo.go.id/web/tahun-2018-posbakum-bertambah> diakses pada tanggal 14 April 2018.



